

Masyarakat Sipil dan Konflik dalam Proyek Strategis Nasional: Menakar Konsekuensi Pembangunan dan Arah Kepentingan Nasional

Afrizal Tjoetra¹, Samwil², Rozatul Annisa³

¹Universitas Teuku Umar/Program Studi Sosiologi Program Magister,
afrizaltjoetra@utu.ac.id

²Universitas Teuku Umar/Program Studi Sosiologi,
samwil@utu.ac.id

³Universitas Teuku Umar/Program Studi Sosiologi,
rozatulannisa02@gmail.com

ABSTRAK

Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi instrumen utama pembangunan Indonesia dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi industri, dan konektivitas wilayah. Namun, percepatan pembangunan tersebut juga memunculkan berbagai konflik agraria, ekologis, dan sosial-politik di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara masyarakat sipil dan konflik dalam implementasi PSN di Indonesia periode 2020–2026. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan terhadap berbagai laporan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta publikasi akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan berbasis PSN cenderung memperbesar ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Konflik muncul akibat lemahnya partisipasi publik, pengadaan tanah yang eksploitatif, marginalisasi masyarakat adat, serta orientasi pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibanding keadilan sosial-ekologis. Di sisi lain, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam melakukan advokasi, resistensi sosial, pengawasan kebijakan, dan penguatan demokrasi partisipatoris. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan PSN tidak cukup diukur melalui capaian investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kemampuan negara menjamin keadilan agraria, perlindungan lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat terdampak.

Kata kunci: Masyarakat sipil; Konflik sosial; Pembangunan; Proyek strategis nasional; Kepentingan nasional.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada era globalisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas investasi, dan meningkatkan daya saing negara (Riani et al., 2024; Safitri et.al., 2025). Dalam konteks Indonesia, pemerintah menjadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai agenda prioritas pembangunan. PSN

mencakup pembangunan infrastruktur, kawasan industri, pertambangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan wilayah strategis nasional (Ervianto, 2017).

PSN diposisikan sebagai motor transformasi ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan fisik dan peningkatan konektivitas antardaerah (Sakty, 2024). Pemerintah berargumentasi bahwa pembangunan tersebut diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi ekonomi global (Zuhra & Miko, 2026). Namun, implementasi PSN di berbagai daerah justru memunculkan konflik sosial, agraria, dan ekologis yang melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat lokal.

Dalam praktiknya, proyek strategis sering memicu pengusuran masyarakat, perebutan ruang hidup, kerusakan lingkungan, serta marginalisasi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu berjalan seiring dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Tjoetra, 2017).

Data KPA, DPR RI, dan WALHI (2024–2025) mencatat peningkatan konflik agraria sepanjang 2020–2024, dengan sektor dominan meliputi perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan infrastruktur. Hal ini menegaskan adanya benturan paradigma pembangunan: di satu sisi, PSN dipandang sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah; di sisi lain, implementasinya sering menimbulkan ketidakadilan sosial-ekologis (Azis et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, masyarakat sipil memainkan peran strategis sebagai aktor resistensi sekaligus pengawas kebijakan. Berbagai bentuk resistensi seperti demonstrasi, advokasi hukum, kampanye media, pendampingan komunitas, hingga kajian akademik menjadi instrumen penting untuk menegaskan hak-hak masyarakat terdampak (Tjoetra et al., 2023). Kehadiran masyarakat sipil menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari capaian investasi dan infrastruktur, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu menjamin keadilan agraria, perlindungan lingkungan hidup, dan demokrasi partisipatoris (Tahir & Hasyim, 2025).

Tabel 1. *Peningkatan Konflik Agraria di Indonesia (2020–2024)*

Tahun	Jumlah Konflik Agraria	Sektor Dominan
2020	241 Kasus	Perkebunan dan Infastruktur
2021	252 Kasus	Pertambahan dan Kehutanan
2022	278 Kasus	Infastruktur dan Industri
2023	241 Kasus	PNS dan Kawasan Industri
2024	295 Kasus	Infrastruktur, Tambang, PNS

Sumber: KPA, DPR RI, WALHI (2024–2025)

Gambaran relasi konflik dalam pelaksanaan PSN dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 1. Relasi Konflik dalam Implementasi PSN



Sumber. Penulis 2026

1.1. Kerangka Teori

Analisis konflik dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dipahami melalui perspektif sosiologi pembangunan dan konflik agraria. Teori pembangunan klasik seperti yang dikemukakan oleh Walt W. Rostow (1960) menekankan tahapan pertumbuhan ekonomi yang linier, di mana industrialisasi dan infrastruktur dipandang sebagai motor utama modernisasi (Rico, 2026). Namun, kritik dari Andre Gunder Frank (1967) dan Immanuel Wallerstein (1974) melalui teori ketergantungan dan sistem dunia menunjukkan bahwa pembangunan sering memperkuat ketimpangan struktural antara pusat dan pinggiran, serta menempatkan masyarakat lokal dalam posisi subordinat terhadap kepentingan kapital global (Karim & Alhasni, 2026).

Dalam konteks agraria, Karl Marx menekankan bahwa konflik kelas muncul dari perebutan sumber daya produksi, termasuk tanah (Kurniawan, 2024). Elaborasi lebih lanjut oleh Tania Li (2007) dan Shohibuddin (2024) menyoroti bagaimana ekspansi proyek pembangunan memicu pengusuran, marginalisasi masyarakat adat, dan kriminalisasi warga. Proposisi utama teori konflik agraria adalah bahwa perebutan ruang hidup merupakan konsekuensi langsung dari orientasi pembangunan yang berorientasi pada kapital dan negara, bukan pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kerangka teori gerakan sosial seperti yang dikemukakan oleh Doug McAdam (1982) melalui *Political Process Theory* menjelaskan bahwa resistensi masyarakat sipil muncul ketika terdapat peluang politik, struktur mobilisasi, dan proses framing isu yang kuat (Carlsnaes et al., 2021). Dalam kasus PSN, masyarakat sipil memanfaatkan jaringan organisasi, advokasi hukum, kampanye media, dan kajian akademik untuk membingkai isu keadilan agraria dan ekologis sebagai bagian dari kepentingan nasional yang lebih inklusif (Al Farisi et al., 2025).

Dengan menggabungkan perspektif pembangunan, ketergantungan, konflik agraria, dan gerakan sosial, penelitian ini berupaya memahami benturan paradigma antara logika pertumbuhan ekonomi dan tuntutan keadilan sosial-ekologis. Proposisi yang dihasilkan adalah bahwa keberhasilan PSN tidak hanya ditentukan oleh capaian investasi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin keadilan agraria, perlindungan lingkungan hidup, serta partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi literatur kritis dan analisis kebijakan untuk memahami dinamika konflik sosial, relasi kekuasaan, serta posisi masyarakat sipil dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2020–2026. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil (KPA, WALHI, AMAN), data statistik nasional (BPS, ATR/BPN), jurnal akademik, dan media nasional (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan isu konflik agraria, dampak lingkungan, dan resistensi masyarakat sipil. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi untuk menemukan pola relasi kekuasaan dan dinamika resistensi (Lestari, 2025).

Table 2. *Sumber data penelitian*

No.	Jenis Data	Sumber
1	Konflik Agraria	KPA, DPR RI
2	Dampak Lingkungan	WALHI, Greenpeace
3	Data Statistik Nasional	BPS, ATR/ BPN
4	Kebijakan PSN	Perpres dan Dokumen Pemerintah
5	Gerakan Masyarakat Sipil	Media, AMAN, WALHI

Sumber: KPA (2023), WALHI (2022), Greenpeace (2022), BPS (2023), ATR/BPN (2023), Perpres PSN (2016 dan pembaruan).

2.1. Kriteria Pemilihan Literatur

Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tema konflik agraria dan implementasi PSN periode 2020–2026. Kriteria utama meliputi: (1) publikasi dari lembaga resmi (KPA, WALHI, AMAN, BPS, ATR/BPN, DPR RI), (2) dokumen kebijakan pemerintah, (3) artikel akademik yang membahas relasi masyarakat sipil, pembangunan, dan konflik sosial, serta (4) media nasional yang memberikan informasi aktual (Shohibuddin, 2024). Pemilihan ini dilakukan untuk memastikan data yang dianalisis memiliki validitas, relevansi, dan keterhubungan langsung dengan isu penelitian.

2.2. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen kebijakan pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil (KPA, WALHI, AMAN), data statistik nasional (BPS, ATR/BPN), publikasi akademik, dan media nasional. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi temuan, mengurangi bias, serta meningkatkan reliabilitas analisis (Ladia Putri, 2025). Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan kritis dalam menelaah literatur, sehingga setiap data yang dipakai tidak hanya diperlakukan sebagai informasi deskriptif, tetapi juga dikaji secara analitis untuk menemukan pola relasi kekuasaan dan dinamika resistensi masyarakat sipil terhadap PSN. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Diagram 2. Tahapan Analisis Data Penelitian



Sumber: Samhati et al., 2025

3. ANALISIS DATA

PSN menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Pengadaan tanah, ekspansi industri, dan pembangunan infrastruktur sering memicu konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Masyarakat sipil berperan penting dalam melakukan advokasi, pengawasan kebijakan, dan resistensi sosial terhadap pembangunan yang dinilai tidak adil.

Ketimpangan relasi kekuasaan dalam implementasi PSN memperlihatkan dominasi negara dan korporasi atas masyarakat lokal. Proses pengadaan tanah yang sering dilakukan secara top-down menimbulkan pengusuran, kriminalisasi, dan hilangnya ruang hidup

masyarakat. Hal ini memperkuat konflik agraria dan memperburuk ketidakadilan sosial, karena pembangunan lebih berpihak pada kepentingan modal daripada kesejahteraan warga.

Peran masyarakat sipil menjadi krusial dalam menghadapi ketidakadilan tersebut. Bentuk resistensi seperti demonstrasi, advokasi hukum, kampanye media, pendampingan komunitas, hingga kajian akademik menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak hanya bertindak sebagai oposisi, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik. Melalui gerakan ini, masyarakat sipil berupaya menegaskan hak-hak warga terdampak, memperkuat demokrasi partisipatoris, dan mendorong negara agar lebih transparan serta akuntabel dalam menjalankan pembangunan.

Konflik yang muncul dari ekspansi PSN mencerminkan benturan antara paradigma pertumbuhan ekonomi dengan paradigma keadilan sosial-ekologis. Paradigma pertama menekankan investasi dan infrastruktur sebagai ukuran keberhasilan, sementara paradigma kedua menekankan perlindungan lingkungan, keadilan agraria, dan kesejahteraan masyarakat. Benturan ini menegaskan perlunya evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan nasional agar tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1. Masyarakat Sipil sebagai Aktor Resistensi dan Demokrasi

Masyarakat sipil sebagai kekuatan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampa di tengah ekspansi pembangunan berbasis proyek strategis nasional. Organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, akademisi, media, dan gerakan lingkungan memainkan peran strategis dalam melakukan advokasi kebijakan dan resistensi sosial (Al Farisi et al., 2025). Bentuk resistensi tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3. *Bentuk Resistensi Masyarakat Sipil terhadap PSN*

Bentuk Resistensi	Tujuan
Demonstrasi	Menolak penggusuran
Advokasi hukum	Perlindungan hak masyarakat
Kampanye media	Membangun opini publik
Pendampingan komunitas	Penguatan masyarakat lokal
Kajian akademik	Evaluasi kebijakan pembangunan

Sumber: Penulis, 2026

Resistensi masyarakat sipil terhadap Proyek Strategis Nasional diwujudkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi. Demonstrasi menjadi sarana langsung untuk menolak penggusuran lahan dan perebutan ruang hidup, sedangkan advokasi hukum digunakan sebagai jalur formal untuk melindungi hak masyarakat melalui gugatan atau judicial review kebijakan. Kampanye media berperan membangun opini publik dengan membingkai konflik agraria sebagai isu keadilan sosial-ekologis, sementara pendampingan komunitas memperkuat kapasitas masyarakat lokal agar mampu bertahan dan memperjuangkan haknya secara berkelanjutan.

Kajian akademik melengkapi bentuk resistensi ini dengan memberikan legitimasi ilmiah terhadap tuntutan masyarakat sipil sekaligus menjadi bahan evaluasi kebijakan pembangunan. Keseluruhan bentuk resistensi tersebut menegaskan bahwa masyarakat sipil adalah aktor demokrasi partisipatoris yang berupaya menyeimbangkan dominasi negara dan korporasi dalam pembangunan.

3.2. Menakar Kepentingan Nasional

Negara mendefinisikan kepentingan nasional melalui indikator pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi industri, dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, masyarakat sipil memandang bahwa kepentingan nasional seharusnya juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat, keadilan agraria, keberlanjutan lingkungan, dan demokrasi partisipatoris (Rahman, 2025).

Diagram 4. Benturan Paradigma Pembangunan



Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pembangunan PSN memberikan dampak kepada masyarakat, antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Dampak Konflik Agraria dalam PSN

Dampak	Konsekuensi Sosial
Pengusuran lahan	Hilangnya ruang hidup masyarakat
Kriminalisasi warga	Ketegangan sosial dan politik
Kerusakan lingkungan	Penurunan kualitas hidup
Hilangnya mata pencaharian	Kemiskinan struktural
Konflik horizontal	Polarisasi sosial masyarakat

Sumber: (KPA, 2023), Walhi (2022)

Sedangkan ilustrasi konflik agrarian dalam pembangunan PSN dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

Gambar 1. *Ilustrasi konflik agrarian dari PSN*



Sumber: Dokumentasi WALHI 2025

Gambar tersebut memperlihatkan sebuah aksi demonstrasi masyarakat sipil di depan bangunan publik yang menjadi simbol otoritas negara. Kasus ini dapat dibaca sebagai bentuk nyata dari konflik agraria dalam PSN, di mana masyarakat lokal berkumpul untuk menolak penggusuran lahan dan menuntut pengakuan atas ruang hidup mereka. Kehadiran bendera Indonesia menunjukkan bahwa protes ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga membawa pesan nasional: pembangunan harus memperhatikan keadilan sosial dan hak warga.

Ekspresi resistensi masyarakat sipil terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap eksploitatif. Masyarakat duduk dan berdiri bersama secara damai, menegaskan solidaritas kolektif dalam menghadapi proyek strategis nasional. Demonstrasi ini mencerminkan ketegangan antara sistem pembangunan yang berorientasi pada investasi dan infrastruktur dengan tindakan masyarakat yang menuntut keadilan agraria, perlindungan lingkungan, serta partisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, gambar ini menjadi ilustrasi bagaimana masyarakat sipil berperan sebagai aktor demokrasi partisipatoris yang berusaha menyeimbangkan dominasi negara dan korporasi.

4. KESIMPULAN

Proyek Strategis Nasional (PSN) memang menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional, namun implementasinya telah menimbulkan konflik sosial, agraria, dan ekologis yang semakin kompleks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang terlalu menekankan investasi dan infrastruktur telah memperbesar ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Kondisi ini menegaskan bahwa paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi perlu dikritisi dan dievaluasi secara mendasar.

Sebagai kontribusi pemikiran baru, artikel ini menawarkan resolusi konflik melalui tiga pendekatan utama. Pertama, reformasi kebijakan agraria yang menjamin hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup, sehingga pembangunan tidak lagi berbasis pada penggusuran dan marginalisasi. Kedua, mekanisme partisipasi publik substantif yang melibatkan masyarakat sipil sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, agar pembangunan benar-benar inklusif. Ketiga, model pembangunan alternatif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial-ekologis, melalui integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan dan demokrasi partisipatoris.

Dengan demikian, keberhasilan PSN seharusnya tidak hanya diukur dari capaian investasi dan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan negara membangun pembangunan inklusif yang mengintegrasikan kepentingan masyarakat sipil. Tawaran resolusi ini menjadi arah baru bagi kebijakan pembangunan nasional: menggeser paradigma dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju penciptaan keadilan agraria, perlindungan lingkungan, dan demokrasi partisipatoris sebagai fondasi kepentingan nasional.

REFERENSI

- Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Penerbit: Kramantara JS.
- Azis, A. R., Bilyaro, W., Dani, M., Ramadhanti, N., Chaniago, R. A., Jarmuji, J., Saputri, K. W., Indayati, A., & Hamka, M. S. (2025). Model Kewirausahaan Sosial Peternak sebagai Strategi Responsi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Ekosistem Swasembada Pangan. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 6(1), 619–631.
- Carlsnaes, W., Thomas Risse, B. A. S., Baehaqie, I., & Rizal, M. (2021). *Aktor-Aktor Transnasional dan Politik Dunia: Handbook Hubungan Internasional*. Nusamedia.
- Ervianto, W. I. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional indonesia. *Simposium Ii Uniid 2017*, 2(1), 98–103.
- Karim, D. F., & Alhasni, R. A. (2026). *Administrasi Pembangunan (Teori, Proses dan Implementasi dalam Pembangunan Nasional)*. CV. Nusantara Press Indonesia.
- Kurniawan, A. (2024). Kompleksitas Teori Konflik Karl Marx Pandangannya Terhadap Kekuasaan Dan Negara. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 30(2), 228–237.
- Ladia Putri, I. (2025). *Responsivitas Pelayanan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Dalam Menindaklanjuti Laporan Masyarakat*. Universitas Jambi.
- Lestari, A. (2025). Politik Agraria dan Resistensi Lokal: Peran Kelompok Keagamaan dalam Penolakan Proyek Geothermal Padarincang. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 623–634.
- Nuryanto, S. P., & Sugiyanto, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Masyarakat Berbasis RW*. Deepublish.
- Rahman, Y. (2025). Kepentingan Nasional vs. Kepentingan Investor: Tinjauan Konstitusional dan Hukum Investasi Internasional atas Polemik Penerapan.
- Riani, N., Harris, A., & Maruf, C. (2024). Daya saing ekonomi Indonesia: Cooperation multilateral dan regional. *Journal Tafkirul Iqtishodiyah*, 4(2), 1–8.

- Rico, F. P. (2026). Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Autoregressive Distributed Lag (Ardl).
- Sakty, I. (2024). Tata Kelola Jaringan Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional= Network Governance Of The National Development Planning And Budgeting Synchronization. Universitas Hasanuddin.
- Samhati, S., Suyanto, E., Rusminto, N. E., Agustina, E. S., Riana, H., & Putri, D. (2025). Transformasi Pembelajaran Bahasa Indonesia: Pelatihan Pengembangan E- Modul Menulis Reks Berita Bagi Guru SMP Se- Kota Bandar Lampung. *Education, Language, and Arts: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 156–163.
- Shohibuddin, M. (2024). Menghindari Kutukan Sumber Daya Alam: Bunga Rampai Sumber Daya Alam, Keadilan dan Perdamaian.
- Tahir, S., & Hasyim, S. (2025). *Suara Desa: Menata Pembangunan dari Akar Rumput*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Tjoetra, A. (2017). Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil dan Kelestarian Perdamaian di Aceh, Indonesia. *Malaysia: Universiti Sains Malaysia*.
- Tjoetra, A., Husna, C. A., Samwil, S., & Fajri, R. (2023). Pasang Surut Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pembentukan Kebijakan Publik di Aceh. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 140–156.
- Zuhra, S. A., & Miko, S. (2026). Investasi Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia: Tinjauan Konseptual terhadap Pemerataan dan Pembangunan Berkelanjutan. *EKOSISTEM: Journal of Economics, Business, and Contemporary Tourism*, 1(2), 165–174.